

ESDM akan Memanggil Pengelola SPBU Swasta

Kementerian ESDM akan menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan SPBU swasta

Diki Mardiansyah

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengumpulkan para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada pekan depan untuk membahas rencana sinkronisasi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan PT Pertamina.

Rencana pertemuan ini menyusul adanya laporan stok kosong bensin nonsubsidi di beberapa SPBU swasta, sekaligus merespons meningkatnya konsumsi di masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, arahan untuk menggelar rapat koordinasi sudah disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil (untuk membahas teknis sinkronisasi dengan Pertamina)," kata dia saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9).

Laode menjelaskan, badan usaha swasta sebenarnya telah diberi tambahan alokasi impor sebesar 10% dari kuota tahun lalu. Dengan begitu, to-

tal kuota pada tahun ini mencapai 110% dari realisasi impor 2024. Namun, permintaan yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi menyebabkan pasokan di SPBU swasta tetap terbatas. "Sinkronisasi itu adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri yaitu hasil dari BUMN yaitu dari Pertamina. Itu sinkronisasi," ujar Laode. Dia menambahkan, spesifikasi BBM yang dipasok dari Pertamina tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan Dirjen Migas. Jika badan usaha swasta membutuhkan variasi tertentu, mereka dapat menambahkan aditif sesuai kebutuhan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan, *shifting* konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke non-subsidi menjadi faktor utama peningkatan permintaan di SPBU swasta. Perubahan pola konsumsi ini terjadi setelah Pertamina menerapkan kewajiban pendaftaran melalui QR Code bagi pembelian Pertalite. "Terjadi *shifting* yang tadinya dari subsidi Pertalite menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami, *shifting* yang

terjadi sekitar 1,4 juta kiloliter," kata dia. Menurut Yuliot, pemerintah ingin memastikan impor BBM, baik oleh Pertamina maupun badan usaha swasta, berjalan seimbang dengan kebutuhan nasional.

Gejala awal monopoli

Sejatinya, kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta masih menjadi sorotan mutakhir ini. Praktisi Migas Hadi Ismoyo menegaskan, seharusnya kekosongan stok tidak boleh terjadi. Sebab, sesuai regulasi, pemerintah wajib menjamin ketersediaan energi, termasuk listrik, gas dan BBM, sebagai komponen vital bagi industri dan masyarakat. Caranya, dengan memberi izin impor BBM bagi ba-

dan usaha. "Masalahnya, proses perizinan impor saat ini tidak *smooth*. Kuota memang ditambah, tapi tanpa kelancaran birokrasi, hasilnya tidak akan terasa. Kalau izin tersendat, investor akan ragu masuk. Itu gejala awal monopoli," tandas dia, kemarin.

Hadi berkata, mayoritas SPBU swasta seperti Shell dan BP lebih memilih impor karena harus menjaga spesifikasi dan mutu BBM sesuai nilai perusahaan (*company value*). Bagi korporasi global, hal ini bukan sekadar soal harga, tetapi menyangkut *branding*.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, sejak tahun lalu terjadi disrupsi global yang mengganggu pasokan

BBM dari kilang luar negeri. Situasi makin berat dengan meningkatnya biaya transportasi karena perusahaan asuransi pengapalan minyak mengerek tarif hingga 8%-10%.

Bagi perusahaan seperti BP atau Vivo yang mengandalkan rantai pasok dari kilang luar negeri, biaya ini membuat mereka tidak kompetitif. "Berbeda dengan Pertamina yang relatif lebih kuat karena punya Pertamina International Shipping dan kilang domestik. Efisiensinya bisa 5%-10% dibandingkan pemain swasta," jelas Yayan.

Pun bagi BP-AKR yang terbiasa memasok dari Singapura, perubahan jalur pasok ke AS atau Timur Tengah, yang kini jadi hub minyak global menambah tantangan baru. ■

Kontari

Sukses mengelola keuangan